



**UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA**

**KAJIAN PERSEPSI STAKEHOLDER TERHADAP PERAN  
SWASTA DALAM PENGURANGAN RESIKO BENCANA  
UNTUK PERTAHANAN NEGARA DI INDONESIA**

**“STUDI KASUS BENCANA DI PULAU SUMBAWA”**

**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister  
dalam ilmu Pertahanan

**INDRA S. BUDIANTO**

**1 2010 03 02 010**

**SEKOLAH KAJIAN PERTAHANAN DAN STRATEGIS PROGRAM  
STUDI MANAJEMEN BENCANA UNTUK KEAMANAN NASIONAL**

**JAKARTA**

**16 MARET 2012**

!

## ABSTRAK

Nama : Indra S. Budianto  
Program Studi : Manajemen Bencana  
Judul : Kajian Persepsi *Stakeholder* Terhadap Peran Swasta Dalam Pengurangan Resiko Bencana Untuk Pertahanan Negara Di Indonesia “Studi Kasus Bencana Di Pulau Sumbawa”.

Tesis ini mengkaji persepsi *stakeholder* bencana di Sumbawa mengenai peran swasta dan lembaga pengaman swasta dalam pengurangan resiko bencana (PRB). Studi ini dilakukan karena manajemen bencana di Indonesia membutuhkan keterlibatan pihak swasta dalam usaha pengurangan resiko mengingat keterbatasan yang dimiliki pemerintah. Teori yang digunakan adalah teori kebencanaan, teori *stakeholder*, dan teori kelembagaan CSR. Hasil penelitian menemukan kalau peran pihak swasta masih rendah dalam PRB di Sumbawa dan dibutuhkan kerangka untuk melibatkan swasta dalam PRB lebih baik lagi. Penelitian ini merekomendasikan pemberdayaan satuan pengamanan swasta untuk melaksanakan tugas ini.

Kata kunci: Satuan pengamanan swasta, Tanggung jawab Sosial Perusahaan, Pengurangan Resiko Bencana!

!

## ABSTRACT!

Name : Indra S. Budianto  
Study Program : Disaster Management  
Title : Study of Stakeholder Perceptions Of Private Role in Disaster Risk Reduction in Indonesia for National Defence "Case Study of Disaster on the island of Sumbawa".

! This thesis examines stakeholders' perceptions of the disaster in Sumbawa on the role of private security agencies and the private sector in disaster risk reduction (DRR). The study was conducted as disaster management in Indonesia requires the involvement of the private sector in risk reduction effort because the limitations of government. The theories used are disaster theory, stakeholder theory, and institutional theory of CSR. The study found that the role of the private sector is still low in the DRR in Sumbawa and necessary framework for involving the private sector in DRR proposed. The study recommends the empowerment of the private security force to carry out this task.!

Key words: Private security force, Corporate Social Responsibility, Disaster Risk Reduction

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Ledakan jumlah penduduk Indonesia membuat negara ini semakin padat dengan konsekuensinya daerah-daerah yang rentan bencana terpaksa didiami oleh banyak penduduk. Seperti pesisir pantai misalnya, semakin banyak ditinggali penduduk padahal didaerah-daerah tersebut termasuk kawasan rentan tsunami. Begitu pula, didaerah pegunungan berapi yang semakin padat penduduk dan memberi potensi besarnya korban jiwa jika terjadi bencana letusan.

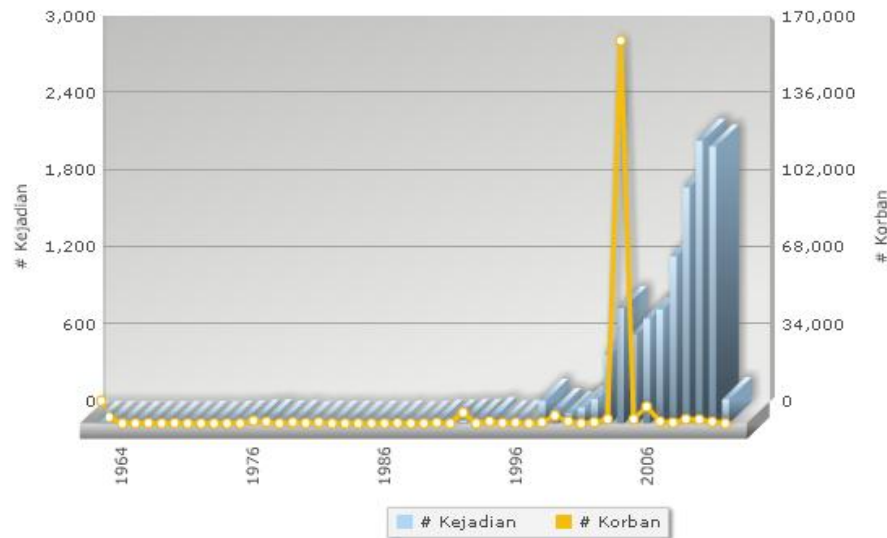
Sementara itu, penambahan penduduk juga memunculkan potensi bencana-bencana non alam seperti banjir bandang karena tersumbatnya aliran air utama oleh sampah, penggundulan hutan yang dapat menyebabkan erosi pada tanah, longsor yang diakibatkan oleh konstruksi bangunan tanpa memperhatikan AMDAL, ataupun kebakaran hutan yang disebabkan oleh perluasan lahan secara intensif dan tradisional.

Bencana-bencana non alam yang disebabkan oleh manusia seperti ancaman terorisme juga secara nyata telah mengubah cara pandang masyarakat dalam masa reformasi sebagai bentuk bencana yang terencana. Berbagai kejadian terorisme menjadi sebuah kondisi bencana tersendiri yang juga membutuhkan penanganan segera dan juga khusus. Belum lagi berbagai bencana alam yang selalu ada, tanpa peduli adanya perubahan iklim atau tidak seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Indonesia merupakan daerah rentan ketiga rawan bencana dikarenakan berada di lapisan pertemuan lempeng (Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik), di kelilingi lautan dalam, dan merupakan wilayah sabuk gunung berapi.

Akibat dari ledakan penduduk, terorisme, dan faktor alam, menyebabkan Indonesia merupakan daerah yang rawan dan rentan bencana alam yang

!

mampu merusak berbagai infrastruktur pertahanan, keamanan, dan tatanan negara, terutama di bidang ekonomi dan sumber daya manusia. Hal ini dapat dilihat dalam grafik peningkatan korban bencana dan kejadian bencana di Indonesia (Gambar 1.1).



**Gambar 1.1** Frekuensi Bencana dan Korban dari Tahun 1964 – 2012 di Indonesia

Sumber: <http://dibi.bnpb.go.id/DesInventar/dashboard.jsp>

Dari tabel di atas terlihat kalau frekuensi kejadian cenderung meningkat walaupun jumlah korban jiwa tidak. Peningkatan tinggi pada jumlah korban dalam grafik tersebut disumbangkan dari bencana tsunami di Aceh tahun 2004. Konsekuensinya bagi pertahanan negara adalah perlunya sebuah usaha tanggap darurat dengan segenap sumber daya yang ada.

Walaupun pemerintah telah berkomitmen untuk menghadapi dan menanggulangi ancaman bencana ini, tetapi dengan hanya mengandalkan sistem pertahanan nasional yang dibangun pemerintah masih belum bisa dirasa maksimal untuk menghadapi potensi bencana yang mungkin datang. Sebagai contoh perbandingan, jumlah personel Tentara Nasional Indonesia pada tahun 2009 baru sebanyak 432.129 personel ([http://id.wikipedia.org/wiki/Tentara\\_Nasional\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia))

!

! sementara jumlah Polisi Republik Indonesia baru mencapai 413.509 pada tahun 2011 (Tribun News, 18 Januari 2012). Total Jumlah tersebut masih kurang dari 1 juta personel sehingga masih belum mencukupi untuk memberikan pelayanan yang maksimal terhadap 259 juta penduduk Indonesia (Kompas, 19 September 2011).

Dalam hal ini, peran masyarakat terutama lembaga-lembaga swasta juga dibutuhkan dalam ikut serta dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Peran lembaga swasta telah terbukti penting bagi kasus manajemen bencana bom Bali di Indonesia. Studi Andari (2007,p.140) menunjukkan kalau sembilan asosiasi bisnis utama terlibat dalam proses pemulihan pasca bencana bom ganda di Bali (Andari 2007,p.141). Walau begitu, menyayangkan sekali pemerintahan yang ada masih kurang cepat dan tanggap untuk mencerna dari pengalaman menghadapi kasus bom Bali.

Terjadinya bencana mempengaruhi persepsi dan kepedulian publik lewat berita yang mereka terima (Brunken, 2006,p.2). Hal ini mampu membuka ruang bagi publik untuk melakukan kritik terhadap pemerintah (Brunken, 2006,p.15) terkait dengan penanganan bencana yang dilakukan pemerintah. Publik akan menilai apakah pemerintah yang mereka amanatkan telah efektif dalam mengambil langkah-langkah preventif untuk menyelamatkan nasib anggota masyarakatnya. Atas dasar alasan ini pertahanan negara dapat terancam lewat berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam menangani keadaan bencana. Dengan keterbatasan yang dimiliki pemerintah, sudah semestinya lembaga pengamanan swasta harus dapat diberdayakan untuk menjadi bagian dari sistem manajemen bencana secara makro dan mikro.

Peran swasta dalam menangani berbagai peristiwa bencana telah cukup banyak ditemukan. Dalam kasus kebocoran reaktor Fukushima di Jepang bulan Maret 2011, pihak swasta mampu menambal jumlah defisit personel

!

penanganan bencana secara efektif dan berhasil ikut meminimalisir dampak dari kebocoran tersebut. Hal yang serupa terjadi dalam kasus kerusuhan di PLTU 3 Banten, Desa Lontar, Kec. Kemiri, Kabupaten Tangerang, Banten. Pembakaran lokasi PLTU 3 Banten oleh masyarakat sekitar berhasil diredam dan diminimalisir dampaknya, salah satunya adalah berkat peran aktif Satuan Lembaga Pengamanan PT. 911 yang berhasil mengevakuasi seluruh Tenaga Kerja Asing pada saat kerusuhan terjadi.

Peran swasta dalam manajemen bencana dikerangka dalam tanggung jawab sosial perusahaan (CSR – *Corporate Social Responsibility*). CSR memang tidak semata mencakup manajemen bencana, ia dapat berupa tindakan amal terhadap masyarakat sekitar dalam kondisi normal, seperti memberi layanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin atau pemberian fasilitas tertentu bagi masyarakat di masa sulit secara ekonomi. Walau begitu, manajemen bencana memiliki posisi khusus. Bencana datang secara mendadak dan membutuhkan kesiapsiagaan yang cermat dan terkoordinasi.

Salah satu usaha untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan diri dengan baik dari segi sarana dan prasarana. Cara lain pada tahap pra bencana adalah mengurangi resiko bencana yang mungkin muncul. Beberapa jenis bencana dapat dihindari dengan persiapan yang baik, terutama bencana yang disebabkan oleh faktor manusia. Bencana alam tidak dapat dihindari, tapi dengan penanganan dan persiapan yang tepat dapat diminimalisir kehilangan jiwa, kehancuran infrastruktur, dan kerentanan kepribadian. Bisa dibayangkan betapa baiknya persepsi masyarakat terhadap pemerintah seandainya sebelum terjadi bencana tsunami di Aceh, pemerintah bersama-sama swasta telah merancang program peringatan dini dengan program penanaman bakau di daerah pesisir, sehingga banyak jiwa yang dapat terselamatkan karena program tersebut.

!

Sekarang yang harus dilakukan pemerintah adalah bagaimana memberdayakan sektor swasta agar ikut serta dalam menangani bencana. Selain hal ini merupakan konsekuensi logis dari wacana *good governance* yang menjadi semangat pemerintahan saat ini, hal ini juga demi kepentingan bisnis itu sendiri. Dengan ikut serta dalam usaha mengurangi resiko bencana, pihak swasta dapat memperoleh peluang usaha yang lebih baik dalam meningkatnya citra perusahaan tersebut di mata masyarakat. Dengan mengorganisasikan manusia, pikiran, dan aturan dalam suatu sistem kerja sehingga menjadi suatu Manajemen Pengamanan yang Terpadu, pihak swasta dapat meningkatkan kelangsungan hidupnya dalam iklim kompetitif di masa globalisasi ini.

Setidaknya 10% dari program CSR di Indonesia berurusan dengan masalah kedaruratan (lihat Tabel 1.1). Proporsi ini termasuk tinggi mengingat ada 9 sektor kegiatan yang dapat dimasuki CSR. Begitu pula, jenis kegiatan lingkungan dapat dimasukkan dalam sebuah bentuk pengurangan resiko bencana. Jika ini disertakan setidaknya ada 16% kegiatan CSR diarahkan pada manajemen bencana.

**Tabel 1.1.** Kegiatan CSR di Beberapa Perusahaan yang Telah Disurvei

No	Jenis Kegiatan	Kegiatan		Dana		Rata-rata Dana per Kegiatan (Juta Rp)
		Total	%	Total (milyar Rp)	%	
1	Pelayanan Sosial	95	34.1	38	32.9	400.0
2	Pendidikan, Penelitian	71	25.4	66.8	57.9	940.8
3	Kesehatan	46	16.5	4.4	3.8	95.7
4	Kedaruratan	30	10.8	2.9	2.5	96.7
5	Lingkungan	15	5.4	0.395	0.3	26.3
6	Ekonomi Produktif	10	3.6	0.64	0.6	64.0
7	Seni, Olahraga, Pariwisata	7	2.5	1	0.9	142.9
8	Pembangunan, Prasarana, Perumahan	5	1.8	1.3	1.1	260
9	Hukum, Advokasi, Politik	0	0.0	0	0.0	0.0
	Jumlah Total	279	100	115.43	100	

Sumber: Tim Universitas Katolik Parahyangan, 2011

Implikasi dari keadaan yang ada sekarang ini adalah diperlukan sebuah strategi mengenai bagaimana pihak swasta dapat didorong untuk lebih bergiat dalam Pengurangan Resiko Bencana (PRB). Peran ini penting mengingat dalam sejumlah kasus, bencana disebabkan juga oleh tindakan dari pihak swasta itu sendiri seperti pencemaran limbah dan penggundulan hutan. Di Pulau Sumbawa misalnya, PT. Newmont dituduh menjadi penyebab banyaknya limbah yang mengotori wilayah perairan sekitar pulau (<http://berita.liputan6.com/read/370694/laut-sumbawa-pembuangan-limbah-tambang-terbesar-dunia>). Di sisi lain, pemerintah masih belum mampu memberikan banyak dukungan mengingat kapasitasnya yang kecil.

Atas alasan tersebut di atas, dibutuhkan sebuah studi yang memberikan gambaran lengkap mengenai persepsi para *stakeholder* manajemen bencana mengenai peran serta pihak swasta yang telah dilakukan dalam kerangka PRB, apa saja faktor pendorongnya, bagaimana rekomendasi mereka, dan dampaknya bagi masyarakat. Dengan mengetahui hal ini, diperoleh gambaran mengenai kebutuhan masyarakat pada konteks PRB dan bagaimana kemudian lembaga pengaman swasta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut.

Atas dasar pemikiran di atas, penulis memilih judul tesis “Kajian Persepsi *Stakeholder* Terhadap Peran Swasta Dalam Pengurangan Resiko Bencana Untuk Pertahanan Negara Di Indonesia: Studi Kasus Bencana Di Pulau Sumbawa”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan pemaparan di atas, diperlukan sebuah penajaman analisa atas masalah yang akan digali dalam kajian ini. Masalah yang menjadi fokus dalam kajian ini dirumuskan sebagai berikut:

“Bagaimana peran lembaga pengaman swasta dalam pengurangan resiko bencana di Indonesia?”

!

### **1.3. Maksud atau Tujuan Penelitian**

Secara umum kajian ini dimaksudkan untuk mengembangkan peran lembaga pengamanan swasta dalam mengurangi resiko bencana di Indonesia. Secara khusus, kajian ini berusaha mempelajari bagaimana peran pihak swasta yaitu perusahaan-perusahaan yang ada di Sumbawa dalam pengurangan resiko bencana di Sumbawa.

Secara rinci, tujuan kajian sekarang adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi para *stakeholder* PRB mengenai peran perusahaan di Sumbawa dalam pengurangan resiko bencana.
2. Untuk mengetahui persepsi para *stakeholder* PRB mengenai peran perusahaan di Sumbawa dalam pengurangan resiko bencana.
3. Untuk mengetahui persepsi para *stakeholder* PRB mengenai faktor pendorong perusahaan di Sumbawa dalam pengurangan resiko bencana di Sumbawa.
4. Untuk mengetahui persepsi para *stakeholder* PRB mengenai dampak keterlibatan perusahaan di Sumbawa dalam pengurangan resiko bencana di Sumbawa.
5. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung peran lembaga pengamanan swasta dalam pengurangan resiko bencana di Sumbawa.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Secara umum, hasil kajian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran berharga bagi pemerintah dan sektor swasta dalam rangka mengurangi resiko bencana di berbagai wilayah di Indonesia. Secara khusus, kajian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai peran sektor swasta dalam mengurangi resiko bencana dalam

!

! kasus-kasus yang telah terjadi di tanah air, khususnya dalam resiko bencana yang disebabkan oleh faktor manusia maupun alam. Lebih lanjut, manfaat kajian ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Secara praktis, memberikan sumbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih memberdayakan publik, khususnya sektor swasta, dalam hal ikut serta mendukung pertahanan negara dengancara meningkatkan perannya dalam manajemen bencana, terutama pada masalah pengurangan resiko bencana.
2. Secara teoritis, memberikan sumbangan literatur ilmiah untuk peneliti lain yang ingin lebih jauh mempelajari aspek-aspek manajemen bencana terutama pada peran CSR maupun dalam peran pihak-pihak dalam pengurangan resiko bencana.

!

## **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

### **2.1 Kerentanan dan Ketahanan Bencana**

Kerentanan adalah “*suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidak mampuan dalam menghadapi ancaman bahaya*” (Bakornas PB). Ia berhubungan erat dengan ketahanan, dimana masyarakat yang rentan berarti memiliki ketahanan bencana yang rendah. Ketahanan bencana sendiri adalah “*kapasitas atau kemampuan masyarakat untuk mengantisipasi, mempersiapkan, merespon, dan memulihkan diri dengan cepat dari dampak bencana*” (Mayunga, 2007).

Karena berhubungan erat, usaha mengurangi salah satunya akan berdampak pada peningkatan satunya lagi. Masyarakat tentu saja berusaha untuk mengurangi kerentanan sehingga mampu meningkatkan ketahanan bencana. Hal ini yang mendasari usaha pemerintah untuk membangun sistem tanggap darurat bencana dengan memberdayakan masyarakat secara keseluruhan dengan memandang bahwa bencana adalah sebuah ancaman terhadap pertahanan negara.

Kerentanan sendiri merupakan satu dari dua faktor penyebab terjadinya resiko bencana. Faktor lain adalah bahaya terjadinya bencana itu sendiri, yang kembali dapat diklasifikasi tergantung pada jenis bencananya. Sebagai contoh, bencana penyakit ternak seperti virus flu burung memiliki bahaya berupa evolusi virus akibat vaksinasi yang buruk. Kerentanan muncul ketika suatu masyarakat memiliki populasi unggas yang besar. Kerentanan dan bahaya ini pada gilirannya membawa resiko bencana yang akhirnya mewujud menjadi bahaya sesungguhnya ketika hadir faktor pemicu, misalnya konsumsi ayam yang tidak higienis.

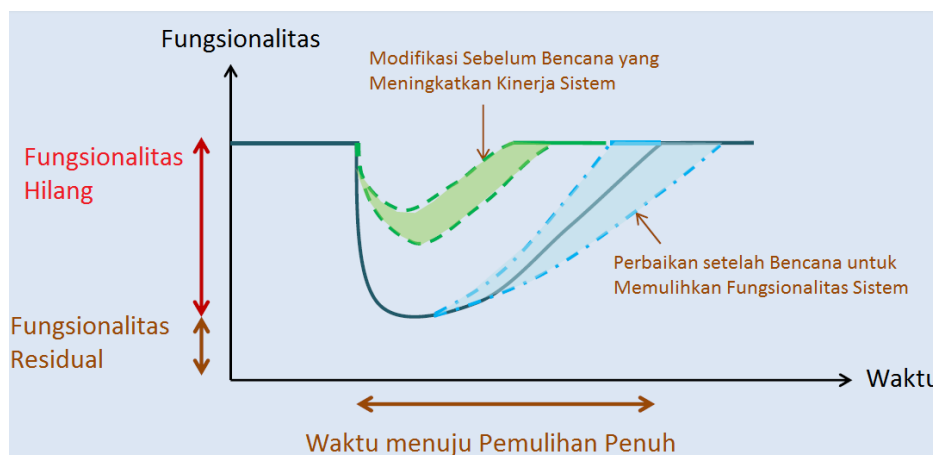
Masyarakat yang rentan paling berbeda dari masyarakat yang tahan ketika bencana dan pasca-bencana terjadi. Masyarakat yang rentan akan

mengalami kerusakan parah dan sulit memulihkan diri pada saat bencana maupun pasca bencana, sementara masyarakat yang tahan cepat pulih bahkan pada saat bencana sedang berlangsung.

Ketahanan masyarakat pada gilirannya merupakan suatu bentuk pembelajaran. Hal ini dinyatakan oleh ISDR (2004) sebagai berikut:

*“Ketahanan adalah kapasitas suatu sistem, komunitas, atau masyarakat yang terpapar pada bahaya secara potensial untuk beradaptasi, dengan menghambat atau berubah untuk mencapai dan mempertahankan tingkat fungsi dan struktur yang dapat diterima. Hal ini ditentukan oleh derajat dimana sistem sosial mampu mengorganisasikan dirinya sendiri untuk meningkatkan kapasitasnya untuk belajar dari bencana yang telah lewat agar dapat lebih melindungi diri dan meningkatkan kemampuan mengurangi resiko.”*  
(p.15-16)

Gambaran mengenai konsep ketahanan bencana dapat dilihat pada gambar 2.1.



**Gambar 2.1** Ketahanan Bencana

Sumber: Cauffman, 2011

Pada gambar tersebut garis hijau menunjukkan masyarakat dengan ketahanan tinggi sementara garis biru muda menunjukkan masyarakat dengan ketahanan rendah. Ketika bencana terjadi (ketika garis biru tua

melentur drastis), modifikasi yang dilakukan sebelum bencana oleh masyarakat yang tahan membuat masyarakat tidak kehilangan banyak fungsionalitas dan segera pulih dengan cepat. Sebaliknya, masyarakat yang tidak tahan lebih banyak kehilangan fungsionalitas dan lebih lama pulih, terutama lewat strategi kuratif, ketimbang preventif.

Banyak model yang diajukan untuk mengubah masyarakat dari rentan bencana menjadi tahan bencana. Sebagai contoh, Granger (2000,p.26) menyebutkan modifikasi ataupun perbaikan sistem dilakukan setidaknya pada lima aspek: pemukiman (arsitektur); penopang hidup (air bersih, listrik, makanan); keamanan (kriminalitas, pungutan liar); masyarakat (tingkah laku); dan latar (posisi geografis). Semua usaha pengurangan resiko bencana ini ada dalam wacana manajemen pengurangan resiko bencana.

## **2.2 Resiko Bencana**

Resiko bencana adalah *“probabilitas konsekuensi membahayakan atau kerugian yang mungkin (kematian, cedera, kerusakan, masalah penghidupan, gangguan aktivitas ekonomi, atau kerusakan lingkungan) yang dihasilkan dari interaksi antara bahaya alamiah atau disebabkan manusia dan kondisi-kondisi rentan”* (ISDR, 2004,p.6). Resiko ini dapat berupa resiko yang dapat ditolerir dan resiko yang tidak dapat ditolerir. Seberapa besar resiko yang dapat diterima ini tergantung pada sumber daya sosial, ekonomi, politik, teknik, dan lingkungan yang tersedia.

Mengetahui resiko merupakan langkah pertama untuk dapat menjalankan manajemen bencana dengan efektif. Tindakan ini dapat berupa perbaikan berkelanjutan pada informasi bahaya, analisis kerentanan dan kapasitas, pemodelan resiko, dan memahami dampak langsung, tidak langsung, maupun sekunder dari sebuah bencana (World Bank, 2008). Penjajakan ini semestinya dilakukan secara partisipatif karena pemerintah tidak dapat melakukannya sendiri dengan keterbatasan yang ada (McEntire, 2000).

Pengkajian ini dilakukan dalam bentuk penilaian persepsi masyarakat atas resiko, pemetaan bahaya, kerentanan dan kapasitas, identifikasi resiko, evaluasi dan penilaian resiko, potensi sumber daya yang tersedia, mobilisasi sumber daya, analisis, dan pelaporan bersama ke masyarakat (Lassa dkk, 2009,p.30).

### **2.3 Pengurangan Resiko Bencana**

Pengurangan resiko bencana (PRB) merupakan bentuk dari kerangka aksi yang dicanangkan secara global lewat Hyogo Framework for Action.

Lima prioritas tindakan PRB adalah:

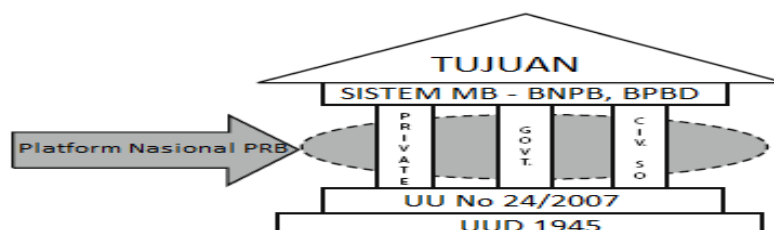
1. Memastikan kalau pengurangan resiko bencana adalah prioritas nasional dan lokal dengan landasan kelembagaan yang kuat untuk implementasinya.
2. Menemukan, menghitung, dan mengawasi resiko bencana dan memperkuat peringatan dini.
3. Menggunakan pengetahuan, inovasi, dan pendidikan untuk membangun budaya keamanan dan ketahanan pada semua tingkatan.
4. Mengurangi faktor resiko.
5. Memperkuat kesiapan bencana untuk respon efektif pada semua tingkatan.

Pengurangan resiko bencana merupakan hal penting terutama bagi negara berkembang rentan bencana seperti Indonesia. Dengan adanya PRB, kita bukan hanya berhasil menyelamatkan banyak nyawa dan harta benda, namun juga tidak mengalami ketergantungan dengan luar negeri dalam pemberian bantuan gawat darurat.

PRB merupakan bagian dari siklus pengelolaan bencana yang terentang mulai dari waktu jauh sebelum bencana, pra bencana, saat menjelang bencana, saat bencana, dan pasca bencana. PRB terletak pada bagian pra bencana. Siklus pengelolaan bencana sendiri mencakup perencanaan dan pengembangan, *action plan*, pencegahan, pengurangan, persiapan dan kesiagaan, dampak bencana, respon tindakan darurat dan pertolongan, pemulihan, dan penelitian (Purnomo dan Sugiantoro, 2010,p.90).

Tujuan dari PRB adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan menekan resiko saat terjadi bencana (Efendi dan Makhfudli, 2008,p.163). Masyarakat mendapat hak untuk hidup dengan layak lewat usaha bersama berkelanjutan ini. Begitu pula, pemerintah dapat memunculkan citra positif di mata masyarakat yang terkena bencana.

Dalam UU 24/2007, istilah PRB diartikan sama dengan mitigasi bencana, baik secara struktural (membuat bangunan, tanggul, rumah tahan gempa, dan sebagainya) maupun secara non-struktural (pembuatan kebijakan, pelatihan, dan lainnya). Kedua jenis mitigasi ini penting untuk melibatkan banyak pihak di dalamnya, termasuk pihak akademik dan mitra lainnya. Rencana aksi nasional PRB melibatkan tiga pilar utama *good governance* yaitu swasta, pemerintah, dan masyarakat madani. Ketiga pilar ini kemudian menopang sistem manajemen bencana nasional yaitu BNPB dan BPBD, yang pada gilirannya bersama mencapai tujuan dari PRB itu sendiri. Keterkaitan bidang-bidang ini ditunjukkan pada Gambar 2.2.



**Gambar 2.2** Unsur-unsur penyusun PRB

Sumber:SC-DRR, 2007,p.11

!

Topangan PRB pada pilar penyusun *good governance* menunjukkan pentingnya peran swasta (*private*) dalam keikutsertaannya mengurangi resiko bencana. Peran ini dapat pada level intervensi global/regional, nasional, kota/lokal, dan masyarakat/rumah tangga. Lebih jauh, ia dapat berupa dukungan pada aspek sosial, finansial, lingkungan, politik, maupun teknologi.

## **2.4 CSR**

### **2.4.1 Definisi CSR**

CSR atau *Corporate Social Responsibility* (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) adalah sebuah konsep yang muncul dalam hubungan antara pihak swasta, pemerintah, dan masyarakat. Konsep ini berfokus pada perusahaan sebagai pihak yang dituntut bukan hanya membuat hubungan tanggung jawab dengan pemerintah dalam bentuk pajak, namun juga membentuk hubungan tanggung jawab dengan masyarakat.

Definisi ISO 26000 mengenai CSR adalah “*tanggung jawab sebuah organisasi untuk dampak keputusan dan kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan lewat perilaku yang transparan dan etis yang konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat; mempertimbangkan harapan para stakeholder; sejalan dengan hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma perilaku internasional; serta terintegrasi dalam keseluruhan organisasi*” (Hohnen dan Potts, 2007).

Dilihat dari definisi yang luas ini, maka CSR bukan hanya berhubungan dengan masyarakat namun juga lingkungannya. Walau begitu, karena CSR pada namanya mengandung makna sosial, maka CSR lebih menekankan pada tanggung jawab organisasi pada masyarakat. Lebih jauh, definisi luas ini bukan hanya mencakup perusahaan, namun juga semua organisasi, termasuk pula organisasi pemerintah. Dalam arti sempitnya, memang organisasi yang dimaksud di sini adalah organisasi profit swasta.

#### 2.4.2 CSR dan Manajemen Bencana

Di Indonesia, perusahaan diwajibkan menjalankan program CSR dengan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 dan UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Di Indonesia, kegiatan yang tergolong CSR antara lain (Subakti, 2010):

1. Pendidikan.
2. Kesehatan.
3. Kebudayaan dan keadaban Indonesia.
4. Kemitraan.
5. Layanan umum.
6. Lingkungan.
7. Bantuan kemanusiaan dan bencana alam.
8. Pemerintahan.

Dari jenis-jenis kegiatan CSR di atas, terdapat hubungan terkait manajemen bencana dengan CSR. Hubungan ini dapat dibentuk setidaknya oleh kegiatan bantuan kemanusiaan dan bencana alam maupun kegiatan lingkungan. Kegiatan bantuan kemanusiaan mungkin terlalu kecil jika kita bandingkan dengan manajemen bencana secara keseluruhan, terutama karena ia ada pada fase pasca bencana. Sementara itu, kegiatan lingkungan dapat lebih bersifat pengurangan resiko bencana, karena dilaksanakan pra bencana sebagai bentuk preventif, terutama pada bencana-bencana karena lingkungan, seperti kebakaran hutan dan banjir. Sebagai contoh, program penghijauan dapat mencegah terjadinya banjir karena penggundulan hutan dan ini termasuk lingkup CSR.

CSR pantas terlibat dalam pengurangan resiko bencana setidaknya atas tiga alasan:

Pertama, seringkali bencana muncul disebabkan oleh perusahaan. Bencana dengan faktor manusia dalam kategori kegagalan teknologi, transportasi, dan lingkungan dapat disebabkan oleh perusahaan.

Kedua, bencana alam dapat merugikan bagi perusahaan itu sendiri. 43% perusahaan yang terkena bencana mengalami kebangkrutan dan 29% lainnya bangkrut dalam dua tahun kemudian (Issar dan Mathur, 2010,p.7).

Ketiga, manfaat umum dari CSR itu sendiri. Menurut Ardana (2008), CSR memberikan manfaat bagi perusahaan dalam bentuk :

1. Terpelihara dan meningkatnya citra perusahaan.
2. Terciptanya hubungan baik dengan masyarakat.
3. Terdukungnya operasional perusahaan.
4. Sebagai sarana aktualisasi perusahaan dan karyawan.
5. Memudahkan perolehan bahan baku.
6. Berkurangnya gangguan masyarakat pada operasional perusahaan.

Ikut sertanya perusahaan dalam pengurangan resiko bencana setidaknya mendorong manfaat ke-1, ke-2, dan ke-6. Citra perusahaan terangkat ketika masyarakat mengetahui perusahaan ikut mencegah potensi bencana yang dapat terjadi di daerahnya. Hal ini pada gilirannya membentuk hubungan baik dengan masyarakat, dan karenanya terwujud ketenangan operasional perusahaan, terutama apabila eksistensi perusahaan tersebut sedikit banyak meningkatnya ancaman bencana di wilayah sekitarnya.

Di sebagian besar perusahaan, urusan CSR berada di tangan divisi hubungan eksternal perusahaan. Walau begitu, sebagian bentuk CSR tidak hanya melibatkan divisi hubungan eksternal. Sebagai contoh, CSR kedaruratan melibatkan pula lembaga pengamanan swasta. Hal ini disebabkan bukan hanya oleh kompleksitas CSR, namun juga sifat dari keahlian yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya.

Hubungan eksternal umumnya lebih terlatih untuk tugas-tugas sosial sementara dibutuhkan pula divisi yang memahami tugas-tugas teknis. Hal

ini dibangun dalam kerangka pelaporan dini terpadu seperti yang pernah diterapkan oleh Caltex. Disini hubungan internal yang dipegang oleh lembaga pengamanan swasta yang ikut terlibat dalam CSR bukan hanya dikerangka sebagai tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat namun juga untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan dalam isu-isu teknis seperti bencana alam. Inilah yang menjadi justifikasi peran lembaga pengamanan swasta dalam CSR perusahaan.

Menurut Twigg (2001) terdapat lima jenis keterlibatan perusahaan dalam CSR bencana. Keterlibatan ini ditunjukkan pada tabel berikut.!

Tabel 2.1. Jenis dan karakteristik keterlibatan CSR dengan aktor lain dalam Pengurangan Resiko Bencana

Jenis Keterlibatan	Contoh	Karakteristik
Filantropis/Karitatif	Donasi dan hibah, dana/uang atau non uang (barang, jasa, fasilitas) ke organisasi dan kelompok kerja lain dalam pengurangan resiko bencana atau secara langsung ke penerima manfaat	Altruistik (meskipun perusahaan mendapatkan manfaat lain misalnya publikasi, namun hal ini bersifat sekunder) Perusahaan mengendalikan agenda : apa yang dilakukan, siapa yang dibantu, dan bagaimana caranya Secara umum relasi langsung antara perusahaan (pemberi bantuan) dan lembaga non profit/komunitas (penerima); <i>stakeholder</i> lain tidak terlibat. Bentuk kerjasama bisa formal (berdasarkan perjanjian) atau informal Pada umumnya jangka pendek dan sekali intervensi, namun kadang juga jangka panjang
Kontraktual	Memberikan kontrak pekerjaan ke organisasi atau kelompok lain untuk melakukan pekerjaan untuk manfaat publik	Perusahaan mengendalikan agenda dan mengelola sumberdaya Altruistik Berdasarkan perjanjian formal, kontrak legal untuk bekerja Pada umumnya jangka pendek

		atau sekali inisiatif Pada umumnya relasi langsung, <i>stakeholder</i> lain tidak terlibat
	Sponsorship ke organisasi atau kelompok lain	Perusahaan mengendalikan agenda dan mengelola sumberdaya Kepentingan perusahaan : mendapatkan keuntungan publikasi, provisi dari barang dan jasa yang dibutuhkan (manfaat publik dari pekerjaan bersifat sekunder) Berdasarkan perjanjian formal, legal Pada umumnya relasi langsung
Kolaboratif	Kerjasama kemitraan dengan organisasi dan kelompok untuk manfaat publik	Menekankan dialog, berbagi tujuan, saling menghargai (perluasan dalam berbagai praktek) Pada umumnya melibatkan berbagai stakeholder Ide dapat berasal dari banyak <i>stakeholder</i> Keragaman kemitraan (formal dan informal) Seluruh <i>stakeholder</i> seharusnya mendapat manfaat dari kemitraan (scenario menang-menang), namun bisa jadi manfaatnya tidak sama Pengendalian sumberdaya dapat diberikan pada beberapa mitra yang lebih besar untuk mengendalikan kemitraan Peluang untuk melakukan kerjasama jangka panjang lebih besar
Adversarial	Perusahaan bertanggung jawab untuk melakukan lobi masalah dampak kemanusiaan dan lingkungan kegiatan	Responsif : agenda dikendalikan oleh organisasi dan kelompok lain Relasi publik lebih penting daripada manfaat publik.

	usaha	
Unilateral	Perusahaan melakukan tindakan non komersial sendiri terpisah dari aktor lain	Pada umumnya jangka pendek, sekali inisiatif, didorong oleh masalah mendadak dan belas kasihan (bantuan tanggap darurat)

Sumber : Twigg, 2001:11

## 2.5 Satuan Pengamanan Swasta

Hampir setiap perusahaan memiliki satuan pengamanan atau satpam. Satuan ini dapat hanya terdiri beberapa orang hingga satu anak perusahaan tersendiri. Semuanya tergabung dibawah naungan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP). Peran dan tanggung jawab BUJP langsung berhadapan dengan masyarakat setempat. Hal ini diatur dalam Peraturan Kapolri No.Pol. (24) tahun 2007 tentang Sistem Pengamanan Manajemen Perusahaan/Instansi Pemerintahan. Lebih jauh, terdapat dua peraturan lain yang mengatur tentang satuan pengamanan yaitu Peraturan Kapolri No.Pol. 18 tahun 2006 tentang Pelatihan dan Kurikulum Satuan Pengamanan dan Peraturan Kapolri No.Pol.17 tahun 2006 tentang Pedoman Pembinaan Badan Usaha Jasa Pengamanan dan Penyelamatan.!

Satuan Pengaman di Indonesia yang sudah mencapai 600,000 personnel, adalah sektor swasta yang memiliki kemampuan dan kemungkinan untuk menjalankan sosialisasi program pengurangan resiko bencana terhadap masyarakat Indonesia yang di tahun 2010 telah mencapai 237.556.363 orang dengan rasio (1 satpam : 394 masyarakat).

Satuan Pengamanan sebagaimana ditentukan dalam UU No.2/2002 dimungkinkan untuk dikelola oleh Sektor Swasta, sedangkan sektor ini memiliki kemungkinan yang cukup signifikan untuk menjadi penyebab bencana sekaligus peredam potensi bencana sehingga membuat dirinya berada di garis depan pengelolaan bencana.

Peran lembaga pengamanan swasta dalam pencegahan resiko bencana dapat diamati dalam pelaksanaan perlindungan hutan. Perusahaan pemegang ijin pengusahaan hutan mengangkat lembaga pengamanan hutan, yang pada gilirannya merupakan satu dari empat pelaksana perlindungan hutan selain polisi kehutanan, pejabat penyidik PNS, dan masyarakat mitra polhut (MMP). Keempat pelindung hutan ini idealnya melestarikan hutan dan salah satunya, mencegah terjadinya efek buruk dari pengusahaan hutan seperti kebakaran hutan, banjir, ataupun tanah longsor (Dephut, 2010).

Di lingkup yang lebih besar, lembaga pengamanan swasta bertindak sebagai pengaman lingkungan, seperti pemukiman, pabrik, kantor, dan pendidikan (Mabes Polri, 2005). Pada perusahaan besar, lembaga pengamanan dibagi menjadi dua divisi yaitu satuan pengamanan keluar dan satuan pengamanan ke dalam. Keduanya bukan bagian langsung di bawah perusahaan, namun merupakan mitra kerja karena mereka bertanggung jawab pada BUJP.

BUJP, berdasarkan tanggung jawabnya sebagai badan usaha yang bernaung di bawah kepolisian, memiliki potensi untuk menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk melakukan manajemen bencana secara komprehensif. Apabila perusahaan berkomitmen untuk melaksanakan CSR dalam aspek lingkungan, maka perusahaan seharusnya lebih aktif menggunakan sumberdaya lembaga pengamanan yang dimilikinya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melatih personil satuan pengamanan mengenai manajemen bencana, khususnya dibidang pengurangan resiko bencana. Dengan cara ini, perusahaan telah memiliki sumberdaya yang terlatih untuk menjalankan CSR melalui program pengurangan resiko bencana pada saat pencegahan maupun pada masa darurat bencana.

## 2.6 Sistem Pertahanan Negara

Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 pasal 1 ayat (2), sistem pertahanan negara adalah *“sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.”*

Definisi diatas mengubah paradigma cara pandang terhadap pertahanan negara yang bersifat semesta dari semata berada di pundak TNI menjadi melibatkan bukan hanya seluruh SDM yang ada, namun juga sumber daya lainnya, termasuk wilayah itu sendiri. Makna ini harus dibedakan dengan ketahanan negara yang berarti *“kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya”* (Santoso, 2001). Dapat diartikan bahwa pertahanan bersifat sistemik dan baku sementara ketahanan bersifat dinamik dan fleksibel. Keduanya penting baik dalam mencegah maupun menghadapi ancaman dari luar maupun dalam.

Dalam sistem pertahanan negara, seluruh warga negara yang terlibat semestinya disusun dalam hirarki-hirarki prioritas. Disinilah terdapat komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Komponen utama adalah TNI yang menjadi garda depan pertahanan nasional karena siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan. Komponen cadangan mencakup sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. Komponen

pendukung sumber dayanasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Komponen pendukung ini termasuklah para militer, tenaga ahli atau profesi, industri strategis, sumber daya alam/buatan dan sarana/prasarana nasional, dan warga negara secara individu maupun kelompok masyarakat (RUU Komponen Pendukung Pertahanan Negara).

Sebagai sebuah sistem, pertahanan negara memiliki masukan, proses, dan keluaran. Masukan terhadap sistem ini adalah sumber daya nasional, sementara prosesnya merupakan subyek, obyek, dan metode penyelenggaraan pertahanan sebagaimana diatur dalam UU No 3/2002, dan keluarannya merupakan daya tangkal negara dan bangsa yang tangguh dalam bentuk ketiga komponen yang telah disebutkan sebelumnya (Perwita, 2009,p.3).

Pergerakan sistem ini berada dalam dua kondisi, p. kondisi perang (OMP – Operasi Militer Perang) dan kondisi damai (OMSP – Operasi Militer Selain Perang) sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Menteri Pertahanan No KEP/17/X/1991. Dengan sistem pertahanan yang baik dan kondisi kehidupan yang kondusif, maka pergerakan yang paling umum adalah OMSP, disini salah satunya adalah penanganan bencana.

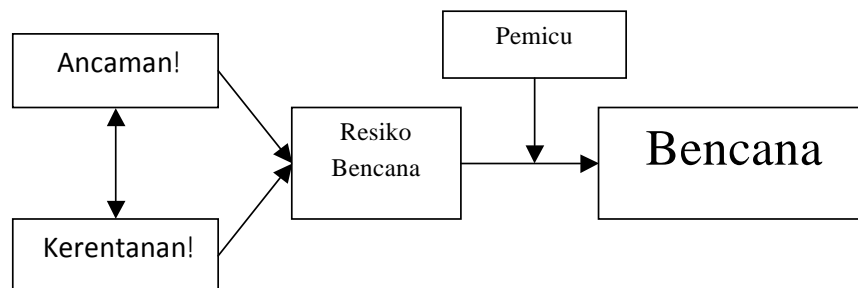
Dari berbagai uraian di atas, dapat disimpulkan kalau terdapat ruang bagi warga negara secara umum untuk ikut serta dalam pertahanan nasional. Hal ini didukung pula oleh UUD 1945 pasal 30 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "*Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara*". Sementara dalam sistem pertahanan ini, warga negara secara umum terletak dalam komponen pendukung, warga negara yang terlatih secara khusus dapat naik ke komponen cadangan, dimana dalam suatu kondisi luar biasa, baik damai maupun perang, dapat dikerahkan secara langsung untuk membantu pertahanan. Kondisi luar biasa yang termasuk adalah situasi didalam kondisi bencana, yang secara langsung atau tidak langsung menjadi ancaman karena sifatnya yang destruktif dan memprovokasi.

## 2.7 Landasan Teori

Terdapat tiga teori yang relevan dengan kajian sekarang yaitu teori kebencanaan, teori kelembagaan, dan teori *stakeholder*.

### 2.7.1 Teori Kebencanaan

Teori kebencanaan menyebutkan kalau bencana merupakan hasil dari adanya resiko bencana dan faktor pemicu bencana. Resiko bencana kemudian berasal dari interaksi antara ancaman dan kerentanan. Kerangka teori kebencanaan ini ditunjukkan dalam Gambar 2.2.



**Gambar 2.3** Faktor-Faktor Pendorong Terjadinya Bencana

Ancaman adalah “suatu kejadian atau peristiwa yang mempunyai potensi dapat menimbulkan kerusakan, kehilangan jiwa manusia, atau kerusakan lingkungan” (BNPB, 2011, p. 3). Sementara itu, kerentanan adalah “suatu kondisi yang ditentukan oleh faktor-faktor atau proses-proses fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mengakibatkan peningkatan kerawanan masyarakat dalam menghadapi ancaman” (BNPB, 2011, p.3). Berbagai kelompok masyarakat dalam suatu wilayah geografis tertentu memiliki tingkat ancaman dan kerentanan yang berbeda-beda. Tingkat ini ditentukan oleh kemungkinan (*probability*) terjadinya bencana di masyarakat tersebut. Semakin tinggi kemungkinan terjadinya bencana, semakin rawan masyarakat tersebut. Karenanya, pengurangan resiko bencana tidak lain adalah pengurangan kemungkinan terjadinya bencana tersebut pada suatu masyarakat. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan

! kapasitas masyarakat yang didefinisikan sebagai “penguasaan sumberdaya, cara, dan kekuatan yang dimiliki masyarakat, yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri, serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana” (BNPB, 2011, p.3).

### **2.7.2 Teori Kelembagaan CSR**

Teori kelembagaan merupakan teori yang menjelaskan mengenai pengaruh kelembagaan terhadap perilaku manusia. Campbell (2007) mengajukan teori kelembagaan CSR sebagai penjelasan mengapa perusahaan menjalankan CSR. Teori kelembagaan CSR terdiri dari tujuh proposisi mengenai faktor yang menyebabkan suatu lembaga melaksanakan CSR.

Ketujuh pernyataan tersebut antara lain:

1. Kondisi keuangan perusahaan dan kesehatan ekonomi.
2. Terlalu banyak atau terlalu sedikit persaingan.
3. Faktor kelembagaan seperti peraturan yang ditegakkan dengan baik.
4. Peraturan dalam perusahaan yang terorganisir dengan baik dan efektif.
5. Organisasi independen dan swasta seperti LSM, organisasi gerakan sosial, investor kelembagaan, dan pers.
6. Publikasi bisnis penting, kurikulum sekolah bisnis, dan relung pendidikan lainnya tempat para manajer berpartisipasi.

!

7. Keanggotaan dalam asosiasi dagang atau pengusaha, yang disusun sedemikian hingga mendorong pelaksanaan CSR.

Teori kelembagaan CSR dapat diterapkan dalam kasus usaha pengurangan resiko bencana. Sebuah perusahaan akan menyertakan satuan keamanannya dalam program CSR pengurangan resiko bencana jika terdapat faktor-faktor di atas.

### **2.7.3 Teori Stakeholder**

*Stakeholder* adalah “mereka yang memiliki saham atau kepentingan dalam program yang ditinjau atau individu dengan kepentingan dalam hasil evaluasi” (Markiewicz, 2005). Teori *stakeholder* menyatakan hubungan antara para *stakeholder* dalam suatu program.

Teori *stakeholder* mengatakan bahwa sebuah organisasi akan cenderung memenuhi segala tuntutan *stakeholdernya* yang beraneka ragam sehingga tercapai pemenuhan kebutuhan pada semua pihak. Teori *stakeholder* karenanya, merupakan sebuah teori mengenai moral manusia dalam berorganisasi (Phillips, Freeman, dan Wicks, 2003). Teori ini relevan dengan CSR karena dalam program-program yang dilakukan dalam kerangka CSR, terlibat para *stakeholder*. Dalam kasus pengurangan resiko bencana, para pihak ini adalah pemerintah, masyarakat, dan BUJP.

Teori *stakeholder* meramalkan bahwa perusahaan akan cenderung memenuhi kebutuhan mereka dengan melakukan pelatihan manajemen bencana pada satuan keamanan, tentunya sejauh hal ini merupakan tuntutan dari para *stakeholder* tersebut.

!

## 2.8 Kerangka Pemikiran

Keterkaitan antara konsep-konsep di atas yang mendorong penulis menyusun kajian sekarang dapat digambarkan dalam Gambar 2.4 berikut:



Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran Kajian

!  
!

## DAFTAR REFERENSI

- Adiningrat, Rio D Praaning Prawira (2009). *Corporate social Responsibility in Indonesia and the impact for investor Belgian-Luxemburg, Indonesian club (BLIC) gathering*. 18 Juni 2009
- Alhabeeb, M, J (2007). *Consumers' Cues For Product Quality: An Application of the Signaling Theory* Allied Academics International Conference, Jacksonville.
- Andari, W.A.D.T. (2007). *Crisis Management: A Case Study of the Indonesian Government Tourism Public Policy after the First and Second Bali Bombings*. Master Thesis. University of Canberra.
- Ardana, I Komang. (2008) *Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial*. *Buletin Studi Ekonomi*, 13, 1, 32-39
- ASOCIO (2004). *Corporate Social Responsibility*. ASOCIO Policy Paper.
- Australian National Emergency Management Commite (2009). *National Strategy for Disaster Resilience: Building our Nations Resilience to Disater* Public Release 7 December 2009
- Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Bakornas PB). *Konsepsi Pengurangan Bencana*.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB (2006). *Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana 2006-2009*. Jakarta: Percetakan RI
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB (2011). *Indeks Rawan Bencana Indonesia, Versi II th 2011* melengkapi seluruh Kabupaten dan Kota
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB (2008). *Indonesia's Partnership for Disaster Risk Reduction*
- Badan Pusat Statistik. (2010). *Kabupaten Sumbawa dalam Angka*. BPS

!

- !
- Brunken, B.L. (2006). *Hurricane Katrina: A Content Analysis of Media Framing, Attribute Agenda Setting, and Tone of Government Response*. Master Thesis. Louisiana State University.
- Campbell, Jhon L (2007) Why Would Corporation Behave in Socially Responsible Ways? An institutional Theory of Corporate Social Responsibility. *Academy of Management Review*, 32, 3, 946-967
- Cauffman, Stephen A (2011). *Standard for Disaster Resilience for & Infrastructure Systems*. NIST U.S Dept of Commerce
- Crotty, M. (1998). *The foundations of social research: Meaning and perspective in the research process*. St Leonards: Allen & Unwin
- D'Amato, A., Henderson, S., Florence, S. (2009) *Corporate Social Responsibility and Sustainable Business: A Guide to Leadership Tasks and Functions*. Greensboro: Center for Creative Leadership.
- Detik News.com (September 2011). Walhi & Pemda Sumbawa Barat Gugat KLH ke PTUN Terkait Newmont. <http://preview.detik.com/detiknews/read/2011/09/27/125950/1731303/10/walhi-pemda-sumbawa-barat-gugat-klh-ke-ptun-terkait-newmont> . Diakses Tanggal 11 Februari 2012, Jam 14:18
- Efendi, Fery dan Makhfudli. (2009) *Keperawatan Kesehatan Komunitas: Teori dan Praktik dalam Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Flyvbjerg, B. (2006). Five Misunderstandings About Case-Study Research. *Qualitative Inquiry*, Vol. 12, No. 2, 219-245
- Fossey, E., Harvey, C., McDermott, F., Davidson, L. (2002). Understanding and Evaluating Qualitative Research. *Australian and New Zealand Journal of Psychiatry*, 36, 717-732

- Gable, G.G. (1994). Integrating Case Study and Survey Research Methods: An Example in Information Systems, *European Journal of Information Systems*, Vol 3, No 2,112-126.
- Gaung NTB. (2 Februari 2012). Polres Sumbawa buka Posko Kesehatan dan Pembersihan Lokasi Banjir.
- Granger, K. (2000).An Information Infrastructure for Disaster Management in Pacific Island Countries.*The Australian Journal of Emergency Management*, 15, 1, 20-32
- Groots International (2011).Understanding Disaster Reliance : Grassroots Women's Strategies for Building Disaster Resilience. [http://www.huairou.org/sites/default/files/UnderstandingResilienceToolGrootsInternational\\_0.pdf](http://www.huairou.org/sites/default/files/UnderstandingResilienceToolGrootsInternational_0.pdf)Diakses Tanggal 17 Februari 2012 Jam 13:17
- Hohnen, Paul., Potts, J. (2007). *Corporate Social Responsibility : AnImplementation Guide for Business* International Institute for Sustainable Development
- Indrawan, D.C. (2011). *Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Perusahaan*.Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Issar, R., Mathur, N.B. (2010). *Disaster Risk Management and The Role of Corporate Sector: The Indian Perspective*. New Delhi: Confederation of Indian Industry.
- Jogiyanto dan Suwardjono (2009) Kolokium Nasional Program Doktor Panitia Kolokium , Yogyakarta 4 Desember 2009
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2004).*Grand Strategy Polri 2005-2025*.
- Kelman, Iain (2009). *Understanding Vulnerability to Understand Disaster*. <http://www.islandvulnerability.org/docs/vulnres.pdf> Diakses Tanggal 20 Februari 2012, Jam 13:18

- !
- Kemp, M. (2001) Corporate Social Responsibility in Indonesia: Quixotic Dream or Confident Expectation? *Technology, Business, and Society Programme Paper No. 6*.
- Lassa, Jonatan dan Pujiono, Puji (2009). *Pengelolaan Resiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK)*. Jakarta: Grasindo
- Liputan 6.com (5 Jan-2012). *Laut Sumbawa, Pembuangan Limbah Tambang Terbesar di Dunia*.  
<http://berita.liputan6.com/read/370694/laut-sumbawa-pembuangan-limbah-tambang-terbesar-dunia>. Diakses Tanggal 7 Maret 2012, Jam 13:18
- Lunatic, Tityn (25 Des, 2011). *Seminar sehari antara GP Ansor dan BPPD*  
 Diakses Tanggal 7 Maret 2012
- Markiewicz, Anne (2005). A Balancing Act : Resolving Multiple Stakeholder Interest in Program Evaluation. *Evaluation Journal of Australasia*, 4, 1-2, 13-21
- Martusa, Riki (2009). Peranan Environmental Accounting terhadap Global Warming. *Jurnal Akuntansi* 1, 2, 164-179
- Mataram News (12 okt 2011). *Pemuda Ansor NTB cabut dukungan atas usulan jadi Menteri*.  
[http://mataramnews.com/index.php/content/50-sosok/administrator/components/com\\_xavideo/assets/administrator/components/com\\_xavideo/assets/modules/mod\\_analogclock/clocks/images/flash/Baru/index.php?option=com\\_content&view=article&id=155:pemuda-ansor-ntb-cabut-dukkungan-atas-usulan-jadi-menteri&catid=48:politik&Itemid=14](http://mataramnews.com/index.php/content/50-sosok/administrator/components/com_xavideo/assets/administrator/components/com_xavideo/assets/modules/mod_analogclock/clocks/images/flash/Baru/index.php?option=com_content&view=article&id=155:pemuda-ansor-ntb-cabut-dukkungan-atas-usulan-jadi-menteri&catid=48:politik&Itemid=14). Diakses Tanggal 4 Maret 2012, Jam 13:19
- Mayunga, Joseph, S (2007). *Understanding and Applying the Concept of Community Disaster Resilience : A capital-based approach*  
 Hazard Reduction & Recovery center, Texas A&M University

- McEntire, D.A. (2000). Sustainability or Invulnerable Development? *The Australian Journal of Emergency Management*, 15, 1, 58-61
- National Disaster Management Division Government of India. *Disaster Risk Management & Role of Corporate Sector – The Indian Perspective*
- National Science and Technology Council, Committee on the Environment and Natural Resources (July 2003). *Reducing Disaster Vulnerability Through Science and Technology* National Science and Technology Council the United States
- Okezone.com (18 Mei 2011). Anggota DPRD Sumbawa Barat blokir jalan PT. Newmont.  
<http://news.okezone.com/read/2011/05/18/340/458392/anggota-dprd-sumbawa-barat-blokir-jalan-pt-newmont>. Diakses Tanggal 8 Maret 2012, Jam 13:19.
- Palang Merah Indonesia. *Upaya Pengurangan Resiko Bencana yang berhubungan dengan Ancaman Bencana*. [http://pirba.hrdp-network.com/e5781/e5795/e5809/e14422/eventReport14454/UPA\\_YAPENGURANGANRESIKOmin.ppt](http://pirba.hrdp-network.com/e5781/e5795/e5809/e14422/eventReport14454/UPA_YAPENGURANGANRESIKOmin.ppt)! Diakses tanggal 21 Februari 2012, Jam 13:20
- Panjah, N.A. (9 Maret 2011). Pengurangan Resiko Bencana (Disaster Risk Reduction).  
<http://tambangunsri.blogspot.com/2011/03/pengurangan-resiko-bencana-disaster.html>! Diakses Tanggal 13 Februari 2012 Jam 13:20
- Perwita, Anak Agung Banyu (2009). Pemberdayaan Wilayah Pertahanan melalui pembinaan Teritorial dalam rangka Pertahanan Negara. Seminar Nasional Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Melalui Binter Bersama Seluruh Komponen Bangsa dalam Rangka Mendukung Kepentingan Nasional. Denpasar, 26 Februari 2009.

- Phillips, Robert, Freeman, Edward, R& Wiks, Andrew , C. (2003). What Stakeholder Theory is Not. *Business Ethics Quarterly*, 13, 4, 479-502
- Purnomo, Hadi. Sugiantoro, Roni dan David, Ratino (2010). *Manajemen Bencana*. Jakarta: Niaga Swadaya.
- Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Komponen Pendukung Pertahanan Negara.*
- Republika (9 Maret 2012). Newmont 'Sumbang' DPRD Sumbawa Gedung Baru.
- Tribun News (18 Januari 2012). Saat ini, Jumlah Polri Mencapai 413.509 Personel.
- Samuel, H., Wijaya, E. (2008) Corporate Social Responsibility, Purchase Intention, dan Corporate Image pada Restoran di Surabaya dari Perspektif Pelanggan. *Jurnal Manajemen Pemasaran*, 3, 1, 35-54
- Santoso, H.B. (2001). Prospek Ketahanan Nasional dalam Era Reformasi dan Otonomi Daerah. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 6, 1, 17-30
- Santoso, S. (2009). Model Sikap Konsumen pada Kegiatan Causes-Brand Alliances. *Kolokium Nasional Program Doktor*, Yogyakarta, 11-12 Desember 2009, 170-203
- Subakti, Panji (2008). *Analisis Pelaksanaan Corporate Social Responsibility dampaknya terhadap citra Perusahaan (Corporate Image) pada PT. Telkom, Tbk.* Skripsi. Universitas Komputer Indonesia
- Susilo, N., Adhi, R. (19 September 2011). Jumlah Penduduk Indonesia 259 Juta. *Kompas*.

- Tarigan, M.L., Widodo, P., Travollindra, Y. (2010). *Laporan Kegiatan Pelatihan Penyegaran Polhut dalam upaya Penegakan Hukum Kasus Illegal Logging*. Palembang: Yayasan Satu Hijau.
- The Australian Journal (2000).Emergency Management Australian Journal, 15, 1.
- The Infrastructure Security Partnership-TISP (2011).*Regional Disaster Resilience Guide for Developing an Action Plan*. 2011 Edition
- Tim Universitas Katolik Parahyangan. (2011). *Corporate Social Responsibility: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*.Universitas Katolik Parahyangan.
- Twigg, J. (2001) 'Corporate Social Responsibility and Disaster Reduction: A Global Overview', Benfield Greig Hazard research Centre, University College London
- UN/ International Strategy for Disaster Reduction (2004).*Living With Risk – A global review of disaster reduction initiatives, 2004 Ver.II,1*.
- UNDP (2004).Lessons Learned: Indonesia's Partnership for Disaster Risk Reduction.
- Velasquez, J. (2010). Disaster Risk Reduction Matters to Business: Public Private Partnership for Disaster Risk Reduction in Asia and the Pacific. Dalam APEC WorkShop, *Public Private Partnership and Disaster Resilience*,Bangkok (24-29 August 2010)
- Wikipedia.Tentara Nasional Indonesia. !  
[http://id.wikipedia.org/wiki/Tentara Nasional Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Tentara_Nasional_Indonesia). Diakses Tanggal 25 Februari 2012, jam 13:21
- World Bank (2008). *Disaster Risk Reduction*.World Bank Practice Notes.
- Yodmani, Suvit.(2001). *Disaster Risk Management and Vulnerability Reduction : Protecting the Poor*.Paper Presented at The Asia &

!

Pacific Forum on Poverty Organized by The Asian Development  
Bank

!